

BAB I

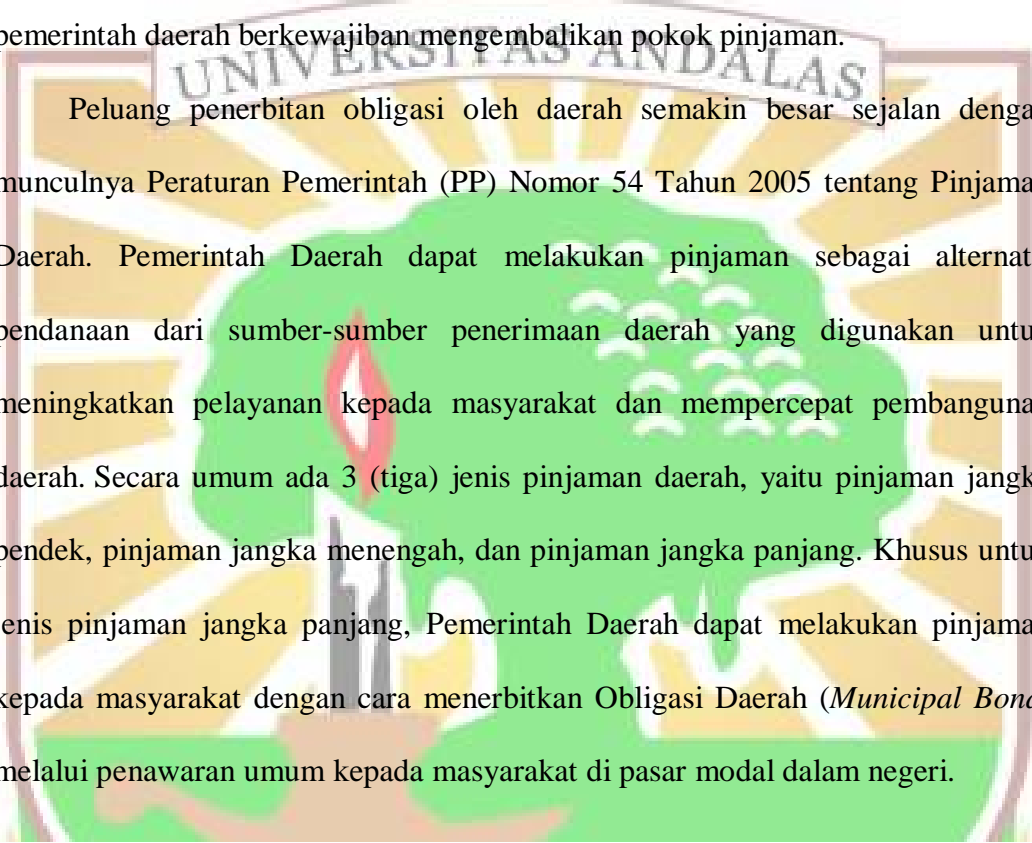
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor utama pendukung pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur. Hal ini didukung dengan sejumlah kajian yang menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan perdagangan (Donaldson, 2010). Sejalan dengan hal ini Pemerintah Pusat pada saat sekarang mulai fokus untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas infrastruktur yang ada di Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan porsi belanja infrastruktur pada APBN. Di sisi lain Pemerintah Pusat juga mulai mengimbau Pemerintah Daerah melalui kebijakan-kebijakannya untuk meningkatkan proporsi belanja infrastruktur yang ada di daerah. Namun bagi Pemerintah Daerah hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan karena anggaran yang disediakan memang belum sepenuhnya mencukupi. Pemerintah Daerah memiliki sumber dana yang terbatas, sedangkan kebutuhan untuk investasi infrastruktur membutuhkan dana yang besar. Pemerintah Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber dana lain dalam pembangunan infrastruktur, salah satunya dengan menerbitkan Obligasi Daerah.

Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di Pasar Modal. Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat. Segala resiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menerbitkan surat utang yang menjadi bukti bahwa pemerintah daerah telah

melakukan pinjaman/utang kepada pemegang surat utang. Pinjaman akan dibayar kembali sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang disepakati. Pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah berkewajiban membayar bunga secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada saat jatuh tempo pemerintah daerah berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman.



Peluang penerbitan obligasi oleh daerah semakin besar sejalan dengan munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman sebagai alternatif pendanaan dari sumber-sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Secara umum ada 3 (tiga) jenis pinjaman daerah, yaitu pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan pinjaman jangka panjang. Khusus untuk jenis pinjaman jangka panjang, Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman kepada masyarakat dengan cara menerbitkan Obligasi Daerah (*Municipal Bond*) melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi pertanian dan pariwisata yang cukup besar. Hal ini terlihat dari dominasi sektor pertanian dalam perekonomian wilayah, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan. Lokasi pertanian tersebar merata di seluruh wilayah dan produksinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu dari sektor pariwisata Kabupaten Tanah Datar memiliki banyak potensi wisata alam dan wisata budaya berupa peninggalan-peninggalan bersejarah kerajaan minangkabau. Namun hal ini tidak didukung dengan infratrukstur yang baik. Masih banyak kawasan wisata yang secara infrastruktur belum terlalu memadai.

Salah satu penyebabnya adalah kurangnya dana anggaran yang dimiliki pemerintah daerah sehingga penggunaan anggaran harus difokuskan untuk kegiatan lain.

Penerbitan obligasi daerah bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan Infrastruktur yang menjanjikan untuk Kabupaten Tanah Datar. Dari segi pendapatan, PAD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2014 berjumlah Rp 99 Milyar berpotensi dalam melakukan penerbitan obligasi daerah. Dari sisi pengelolaan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah meraih prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemda 3 tahun berturut-turut untuk LK tahun 2012, 2013, dan 2014 dengan peningkatan kualitas WTP murni di tahun 2013 dan 2014. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan salah satu kabupaten yang potensial dalam menerbitkan obligasi daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menerbitkan obligasi daerah, terutama dilihat dari aspek kemampuan keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sejauh mana kesiapan Kabupaten Tanah Datar dalam menerbitkan obligasi daerah dilihat dari aspek

kemampuan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku tentang obligasi daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan peneliti tentang kesiapan Pemerintah Tanah Datar dalam menerbitkan Obligasi Daerah dilihat dari aspek kemampuan keuangan
2. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan informasi dalam mempertimbangkan pelaksanaan alternatif pembiayaan daerah melalui obligasi daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian lebih lanjut.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penilaian kemampuan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan melakukan analisa terhadap Laporan Realisasi Anggaran dalam kurun waktu 5 periode anggaran yaitu TA 2010 – 2014. Pemilihan periode analisa tersebut didasarkan atas perolehan data laporan keuangan audited terakhir Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.